

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seperti yang kita ketahui, perempuan merupakan salah satu kelompok gender yang sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan menjadi objek kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu isu yang termasuk dalam Isu Kekerasan Berbasis Gender (*Gender Based Violence*). Dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional, isu-isu terkait kekerasan dan pelanggaran hak yang berkaitan dengan gender tertentu telah menjadi salah satu isu yang layak dikaji.

Kekerasan terhadap kelompok gender khususnya kaum perempuan pada dasarnya mempunyai berbagai macam jenis, seperti kekerasan di depan publik maupun kekerasan di ruang personal. Salah satu definisi yang mempertegas klasifikasi jenis kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari definisi Resolusi PBB no 48/104, 20 Desember 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan yang menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan, atau mungkin mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau kerugian psikologis atau penderitaan perempuan, termasuk perampasan hak-hak mendasar bagi kaum perempuan, baik yang terjadi di ruang publik maupun

tidak, adalah sebuah tindakan yang dapat digolongkan terhadap tindakan pelanggaran hak bagi kaum perempuan.<sup>1</sup>

Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi isu penting bagi dunia internasional untuk dihadapi, karena permasalahan ini telah membuat Organisasi intrnasional dunia , yaitu *United Nations* membuat sebuah organisasi yang bertugas untuk menangani isu-isu permasalahan perempuan. Pada tahun 2010, United Nations General Assembly membuat United Nations Women, yaitu Badan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women dibentuk oleh Resolusi Majelis Umum nomor 64/289, dan mulai dioperasionalisasikan semenjak Januari 2011. UN Women menggantikan entitas sebelumnya yaitu UNIFEM,<sup>2</sup> dan juga merupakan anggota dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>3</sup>

Salah satu isu pelanggaran hak-hak kaum perempuan yang sedang menjadi perhatian UN Women adalah isu kekerasan terhadap perempuan di Malawi. Malawi adalah sebuah negara di Afrika Timur yang berbatasan dengan Tanzania di sebelah utara, Zambia di barat laut, dan Mozambik di timur, selatan dan barat.<sup>4</sup> Malawi

---

<sup>1</sup> ILO (*International Labour Organization*) , *Kerentanan Kekerasan Berbasis Gender dan HIV-AID pada Pekerja Migran Indonesia*, diakses dalam: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_159846.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_159846.pdf), 17 April 2017, pukul 12.00 WIB.

<sup>2</sup> UNIFEM adalah akronim dari *United Nations Development Fund for Women*, salah satu organisasi yang berada di bawah PBB yang didirikan pada tahun 1976. Pada tahun 2010 organisasi ini bertransformasi menjadi UN Women yang kemudian mulai bekerja pada 2011.

<sup>3</sup> United Nations General Assembly, *UN Women: A New Era in the UN's Work on Women*, diakses dalam: [https://www.un-ngls.org/index.php/un-ngls\\_news\\_archives/2010/852-un-women-a-new-era-in-the-un%E2%80%99s-work-for-women](https://www.un-ngls.org/index.php/un-ngls_news_archives/2010/852-un-women-a-new-era-in-the-un%E2%80%99s-work-for-women), 29 April 2017, pukul 15.00 WIB.

<sup>4</sup> CIA, *World Fact Book*, diakses pada <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html>, 29 April 2017, pukul 15.00 WIB.

merupakan salah satu dari beberapa negara di Afrika yang akan isu-isu gender yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kekerasan terhadap perempuan.

Ada beberapa jenis pelanggaran hak kaum perempuan yang kerap kali terjadi di Malawi. Pelanggaran ini meliputi beberapa pelanggaran yang sudah membudaya atau dianggap. Kekerasan terhadap perempuan yang telah membudaya di Malawi adalah praktek pernikahan dini sebelum seorang gadis menginjak usia 18 tahun. Praktek ini dianggap tidak melanggar hukum, mengingat para orang tua yang mempunyai anak-anak perempuan ingin segera terbebas dari beban membiayai anak perempuan mereka, sehingga praktek ini umum terjadi di Malawi.<sup>5</sup>

Praktek lainnya yang telah dianggap membudaya adalah praktek perbudakan dan *women trafficking*. Praktek *women trafficking* sendiri masih dianggap legal oleh pemerintah karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang tindakan ini.<sup>6</sup> Tindakan *women trafficking* di Malawi umumnya dipraktekkan berdasarkan izin dari pihak keluarga korban. Para pelaku *women trafficking* ini umumnya menjanjikan pekerjaan yang persuasif bagi korban dan keluarganya, sehingga mereka akhirnya tertarik untuk ikut. Pada akhirnya para korban akan dieksploitasi sebagai pelacur dan budak.<sup>7</sup>

Praktek pelanggaran dan kekerasan terhadap kaum perempuan berikutnya adalah tradisi ritual yang dikenal sebagai Kulowa Kufa (*Sexual cleansing*). Tradisi ini juga dikenal sebagai *Widow Cleansing*.<sup>8</sup> Praktek ini umumnya dilakukan

---

<sup>5</sup> UN WOMEN, *UN Women Annual Report 2014-2015*, h. 18

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 19

<sup>7</sup> ECPAT International, *Global Monitoring Of Action Against Commercial Sexual Exploitation Of Children in Malawi*, Bangkok: ECPAT Press, 2016, h. 14

<sup>8</sup> *Widow Cleansing* adalah istilah lain dari *sexual cleansing* dengan objek perempuan janda di Malawi.

terhadap anak gadis yang baru menginjak masa pubertas yang kemudian dipaksa untuk berhubungan badan dengan peria dewasa. Praktek ini juga dilakukan terhadap para janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Tujuan praktek ini menurut anggapan orang-orang Malawi dapat mengusir kekuatan supranatural yang buruk di dalam tubuh seorang gadis maupun janda.<sup>9</sup>

Praktek *sexual cleansing* selanjutnya juga turut menyumbang pada meningkatnya pengidap HIV/AIDS di Malawi. Tradisi ini semakin menjadikan HIV risiko besar bagi masyarakat Malawi, karena tradisi ini masih dilakukan atas kepercayaan masyarakat Malawi yang memiliki beragam etnik Menurut data yang dilansir dari AVERT, yaitu sebuah lembaga yang menyediakan informasi seputar HIV dan AIDS, Malawi menjadi penyumbang pengidap HIV AIDS terbanyak di Afrika, dengan jumlah korban perempuan 4 dari 10 perempuan dimulai dari umur 15-19 tahun.<sup>10</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah realitas nyata di Malawi karena norma-norma patriarki dan nilai-nilai, 40% wanita dalam survei 2012 melaporkan mereka telah mengalami kekerasan seksual dalam hidup mereka, 30% pelaporan mengalami kekerasan fisik dan 44% pelaporan yang memiliki pengalaman kekerasan psikososial. Satu dari tiga anak perempuan menikah sebelum usia 18. Menurut UN Women, Malawi memiliki salah satu tingkat tertinggi

---

<sup>9</sup> Philo Lomba, *Widow Cleansing in Malawi*, Jurnal American International Journal of Contemporary Research Vol. 4, No. 1, Januari 2014, h. 35

<sup>10</sup> AVERT, 2016, *Hiv and aids in sub-saharan africa regional overview*, diakses dalam <https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/sub-saharan-africa/overview>, 29 April 2017, pukul 15.00WIB.

perkawinan anak di dunia: setengah dari anak perempuan menikah sebelum usia 18, biasanya karena keluarga yang terlalu miskin untuk terus mendukung mereka. Selain itu, kehamilan remaja mencapai hitungan 20% sampai 30% dari kematian ibu, dan hanya 45% anak perempuan melanjutkan pendidikan mereka di luar kelas 8.<sup>11</sup>

Berdasarkan laporan dari *Malawi Demographic and Health Survey 2010*, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan seksual mencapai 41%<sup>12</sup>. *Malawi Demographic and Health Survey* juga mempublikasikan partisipasi perempuan dalam menentukan *decision making*-nya dalam sebuah keluarga. Jika pada tahun 2009-2010 hanya sekitar 20% perempuan di Malawi yang mau mengekspresikan kehendak atau *decision making*-nya dalam sebuah keluarga, maka pada tahun 2015-2016 meningkat menjadi 40%. Tentunya hal ini merupakan improvement yang positif.<sup>13</sup>

Program-program UN Women yang diimplementasikan di Malawi berorientasi pada program yang bersifat memberdayakan perempuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan level *awareness* penduduk malawi terhadap potensi perempuan-perempuan di negara tersebut yang selama ini termarginalkan karena budaya dan permasalahan ekonomi. Program-program UN Women dan keadaan

---

<sup>11</sup> UN Women, *In Malawi UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson spotlights efforts to end child marriage*, diakses dalam: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55258#.WFKIBVN97Dc>, 2 Mei 2017, pukul 18.30 WIB

<sup>12</sup> *Malawi Demographic and Health Survey 2010*, dalam: Human Rights Watch, *I've Never Experienced Happiness: Child Marriage in Malawi*, New York, Human Right Watch Publisher, 2014, h. 11

<sup>13</sup> *The 2015-16 Malawi Demographic and Health Survey (2015-16 MDHS)*, Zomba, Malawi, 2016, h. 15

perempuan di Malawi inilah yang lantas menstimulasi penulis untuk membuat sebuah penelitian dengan tema pemberdayaan perempuan di Malawi.

## **1.2 Rumusan Masalah :**

Rumusan Masalah merupakan pertanyaan mendasar yang selanjutnya akan menjadi guidance bagi fokus penelitian yang akan penulis bahas. Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **Bagaimana peran UN Woman dalam memberdayakan perempuan di Malawi?**

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan penelitian penulis:

- a. Untuk program pemberdayaan perempuan UN Women di Malawi
- b. Untuk mengetahui upaya UN Women dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan di Malawi.
- c. Untuk mengetahui pengaruh upaya UN Women dalam mengimplementasikan program-program yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan di Malawi.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Akademis**

Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang mengkaji bidang *gender*, kekerasan *gender*, pelanggaran hak terhadap kaum perempuan serta upaya-upaya organisasi internasional dalam berkontribusi dalam mengurangi level pelanggaran-pelanggaran hak terhadap *gender* tertentu.

#### **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulisan penelitian ini diharapkan dapat Meningkatkan level pemahaman penulis dan khalayak umum terhadap isu-isu *gender* dan pentingnya kesetaraan hak bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang *gender* dan perbedaan-perbedaan lainnya.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan guna meminimalisir kesamaan dengan penelitian-penelitian lainnya, penulis juga sedikit mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas seputar isu yang sangat erat relevansinya dengan penelitian penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini penulis ulas secara singkat dan jelas, yang kemudian penulis rangkum dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.

Penelitian terdahulu pertama yang penulis ambil adalah penelitian Ratih Probosiwi yang berjudul *Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia (Women And Its Role On Social Welfare*

*Development*).<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk jurnal yang membahas seputar minimnya peran perempuan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi karena sulitnya perempuan untuk mengakses pendidikan. Selain itu, minimnya keterampilan perempuan di Indonesia juga menjadi kendala bagi para perempuan yang ingin mendapatkan pekerjaan di sektor reel.

Karena minimnya kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi inilah lantas pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial terpilah berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan berikutnya adalah membentuk focal point yang berfungsi memfasilitasi dan membantu pengarusutamaan gender dalam sektor dan menjadi penanggungjawab bagi kepentingan gender di unit/kementerian. Walaupun tidak SK yang dikelyarkan, namun penunjukan langsung secara informal telah dilakukan. Langkah berikutnya adalah mengeluarkan SK Menteri Sosial RI Nomor 07/PEGHUK/2002 tentang Pokja Pengarusutamaan Gender bidang Kesejahteraan Sosial Mengeluarkan SK Kepala Balatbangsos Nomor 01/PPJ/KSM/I/Tahun 2002 tentang dibentuknya Tim Teknis Pokja Bidang Kesejahteraan Sosial. Kebijakan yang terakhir adalah melakukan analisis gender untuk Repeta 2003 pada Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah Sosial. Berkat kebijakan-kebijakan ini akhirnya banyak organisasi dan LSM perempuan yang mulai muncul dan ikut serta dalam memberdayakan sesama kaum perempuan.

---

<sup>14</sup> Ratih Probosiwi, *Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development)*, Jurnal Administrasi Negara Natapraja, Volume 3, No. 1, tahun 2015.



Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat dilihat dari alat analisa yang sama. Penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan perempuan sebagai alat analisa kasus, sama halnya dengan penelitian penulis yang menggunakan konsep yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada isu spesifik yang diambil. Penelitian ini menggunakan isu dalam negeri, sedangkan penelitian penulis mengambil isu di Malawi.

Skripsi yang ditulis oleh *Suci Ayuningtiyas* dengan judul “*Peran United Nations Woman dalam melindungi hak-hak kaum perempuan Somalia dan pengaruhnya terhadap kesetaraan gender*”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yakni penulis mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi perempuan sebelum adanya keterlibatan UN Women serta mengetahui peran UN Women pasca terkait *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* dalam menyelesaikan permasalahan perempuan di Somalia.

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Variabel yang digunakan adalah *Organisasi Internasional* menjelaskan bentuk kerjasamanya dengan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun sesama kelompok yang berbeda, diwujudkan melalui organisasi UN Women dalam melindungi hak-hak kaum perempuan Somalia dan pengaruhnya terhadap kesetaraan gender.

---

<sup>15</sup> Suci Ayuningtiyas, 2016, *Peran United Nations Women Dalam Melindungi Hak-Hak Kaum Perempuan di Somalia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender*, Skripsi, Bandung :Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

Hasil penelitian yang dapat kita simpulkan bahwa organisasi internasional mengambil peran melalui UN Women dengan kondisi negara Somalia yang tidak stabil antara pemerintah dan masyarakat meliputi kelompok militan maupun warga sipil yang menyebabkan tidak adanya perlindungan bagi korban luka-luka hingga meninggal dunia. Serta dengan adanya badan ini yang bergerak dalam memberdayakan perempuan diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan serta menyembuhkan luka perempuan di Somalia yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan, perlakuan tak adil yang diakibatkan oleh konflik di Somalia.

Adapun poin penting yang membedakan antara skripsi yang ditulis oleh Suci Ayuningtiyas dengan skripsi penulis yang berjudul "*Peran United Nations Woman dalam memberdayakan perempuan di Malawi*" adalah peneliti terdahulu lebih memfokuskan peran United Nations Woman yang berada di negara Somalia yang memiliki konflik yang menyebabkan pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan perlakuan tak adil kepada perempuan. Sedangkan penulis, lebih memfokuskan pada peran United Nations Woman dalam memberdayakan perempuan di Malawi.

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Suci Ayuningtiyas dengan penelitian *Peran United Nations Woman dalam memberdayakan perempuan di Malawi* adalah peran organisasi internasional UN Woman dalam berperan menyelesaikan permasalahan perempuan yang meliputi adanya kekerasan serta pelecehan seksual yang dialami perempuan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nurliana yang berjudul "*Peran United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (UN*

*Women) Dalam Penanganan Diskriminasi Sosial-Budaya di India*".<sup>16</sup> Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang menjelaskan dan menganalisa Peran UN Women Dalam Penanganan Diskriminasi Sosial-Budaya terhadap Perempuan di India.

Teknik analisa yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan berbagai sumber literature dan sumber-sumber bacaan lain untuk mendukung penelitian. Variabel yang digunakan adalah konsep diskriminasi dan peran organisasi internasional.

Hasil penelitian ini adalah penghapusan diskriminasi yang diberlakukan tidak akan menjamin dalam melindungi perempuan dari tindakan-tindakan berbasis gender tanpa didukung implementasi dari semua pihak yang terkait. Adapun peran UN Women yang menangani masalah tersebut sebagai instrumen melalui perannya sebagai fasilitator serta mediator dimana peran ini memberikan dampak positif dengan ditambahnya program bantuan yang turut membantu dan meringankan beban kehidupan perempuan di India.

Adapun poin penting yang membedakan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang mengambil judul *Peran UN Woman dalam memberdayakan perempuan di Malawi* adalah peneliti terdahulu membahas diskriminasi yang terjadi di India, yang menyebabkan kekerasan dan pelecehan seksual serta ketidakadilan yang dialami perempuan di India.

---

<sup>16</sup> Nurliana, *Peran United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (UN Women) Dalam Penanganan Diskriminasi Sosial-Budaya di India*, Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 4 No. 1, (2016), Samarinda: Universitas Mulawarman, h.305-314 diakses dalam [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/25%20\(11-01-16-11-05-45\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/25%20(11-01-16-11-05-45).pdf) (15/03/2017. 11.53 WIB)

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh *Nurliana* dengan penelitian *Peran UN Woman dalam memberdayakan perempuan di Malawi* adalah peran organisasi internasional yang turut mengambil peran dalam kasus tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di India.

Dalam jurnal yang ditulis oleh *Lista Waladeri* yang berjudul “Peran UNICEF Dalam Mengatasi Permasalahan Milisi Anak di Republik Afrika Tengah”<sup>17</sup> peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan peran *UNICEF* dalam mengatasi permasalahan milisi anak di Republika Afrika Tengah.

Teknik analisa yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan berbagai sumber literature dan sumber-sumber bacaan lain untuk mendukung penelitian. Variabel yang digunakan adalah peran organisasi internasional, konsep tentara anak dan konsep *Human Security*. Hasil penelitian ini adalah *UNICEF* yang berperan aktif dalam menghentikan permasalahan perekrutan milisi anak oleh koalisi selesa juga harus menyelasiakn misi-misi kemanusiaan yang lain seperti pendidikan, kesehatan serta pemulihan mental anak-anak pasca konflik yang mengakibatkan anak-anak tersbut mengalami berbagai macam perlakuan keras dari lingkungan sekitar bahkan dari keluarga sekalipun.

Adapun poin penting yang membedakan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang mengambil judul *Peran UN Woman dalam meberdayakan perempuan*

---

<sup>17</sup> *Lista Waladeri, Peran UNICEF Dalam Mengatasi Permasalahan Milisi Anak di Republik Afrika Tengah*, Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol,2 NO, 4, (2014), Samarinda: Universitas Mulawarman, H.919-934 diakses dalam [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JURNAL%20LISTA%20\(11-12-14-08-48-22\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/JURNAL%20LISTA%20(11-12-14-08-48-22).pdf) (15/03/2017. 12.50 WIB)

di Malawi adalah peneliti terdahulu membahas peran UNICEF yang mengatasi permasalahan milisi anak di afrika tengah , sedangkan peneliti membahas peran UN Women dalam memberdayakan perempuan di Malawi. Hal ini jelas jauh berbeda dari fokus yang akan mereka bahas.

Persamaan dari penelitian yang ditulis *Listia Waladeri* dengan penelitian Peran UN Women dalam memberdayakan perempuan di Malawi adalah jenis penelitian terdahulu dan peneliti sekarang mengambil teori organisasi internasional yang sama dalam mengkaji permasalahan peran organisasi tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh *Trisnawati* dengan judul “*Peran UNIFEM (United Nations Development Fund For Women) dalam upaya melindungi hak-hak perempuan pada konflik sipil Darfur*”<sup>18</sup> peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian konflik sipil Darfur yang berujung bagaimana upaya organisasi internasional UNIFEM dalam upaya untuk melindungi hak-hak perempuan di tempat konflik tersebut.

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif. Variabel yang digunakan adalah konsep organisasi internasional dan *Gender Based Violence (GBV)*. Konsep *Gender Based Violence (GBV)* mempunyai makna yakni sebagai bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki.

---

<sup>18</sup> Trisnawati, 2015 *Peran UNIFEM (United Nations Development Fund For Women) dalam upaya melindungi hak-hak perempuan pada konflik sipil Darfur*, Skripsi, Malang :Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi yang ditulis oleh *Nurul Anisa* dengan judul “*Peran United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan*”<sup>19</sup> peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan atau menjelaskan peran organisasi *United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)* terhadap program PAUD-HI di Sulawesi Selatan, serta melihat efektivitas kerjasama pemerintah dan *UNICEF* dalam Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan.

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisa data kualitatif. Variabel yang digunakan adalah *Konsep Organisasi Internasional*, yang menjelaskan bentuk kerjasamanya dengan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun sesama kelompok yang berbeda, diwujudkan melalui organisasi *UNICEF* dalam pendidikan dan kesehatan anak PAUD-HI di Sulawesi Selatan. *Konsep Bantuan Luar Negeri*, akan menjelaskan bagaimana alur bantuan yang diberikan melalui program *UNICEF* di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan organisasi *United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)* terhadap program PAUD-HI tersebut adalah dengan advokasi dan capacity building. Sedangkan efektivitas kerjasama pemerintah dan *UNICEF* dalam menjalankan program tersebut adalah dengan mengintegrasikan pelayanan PAUD-HI yaitu

---

<sup>19</sup> Nurul Anisa, 2014, *Peran United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan*, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

pendidikan, kesehatan dan bina keluarga balita, menjadi satu tempat menjadi Holistik dan Integratif.

Adapun poin penting yang membedakan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang mengambil *Peran UN Women dalam memberdayakan perempuan di Malawi* adalah peneliti terdahulu membahas tentang program PAUD-HI di Sulawesi Selatan, serta melihat efektivitas kerjasama pemerintah dan *UNICEF* dalam Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan, sedangkan peneliti membahas peran *UN Women* dalam mengatasi permasalahan perempuan di Malawi.

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh *Nurul Anisa* dengan *Peran UN Women dalam memberdayakan perempuan di Malawi* adalah teori organisasi internasional sebagai pondasi awal untuk mengkaji suatu permasalahan yang membahas tentang organisasi internasional.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian**

No.	Nama Peneliti/ Judul Penelitian	Teori/Konsep	Hasil Penelitian
1	Ratih Probosiwi/ <i>Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia (Women And Its Role On Social Welfare Development</i>	Jenis Penelitian deskriptif/Konsep pemberdayaan perempuan.	<p>Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pemerintah indonesia telah mencanangkan beberapa kebijakan pemberdayaan perempuan yang tertuang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 36 tahun 1999.</li> <li>2. Kebijakan berikutnya adalah membentuk focal point yang berfungsi memfasilitasi dan membantu pengarusutamaan gender dalam sektor dan menjadi penanggungjawab bagi kepentingan gender di unit/kementerian.</li> <li>3. Langkah berikutnya adalah mengeluarkan SK Menteri Sosial RI Nomor 07/PEGHUK/2002 tentang Pokja Pengarusutamaan Gender bidang Kesejahteraan Sosial Mengeluarkan SK Kepala Balatbangsos Nomor 01/PPJ/KSM/I/Tahun 2002.</li> <li>4. Kebijakan yang terakhir adalah melakukan analisis gender untuk Repeta 2003 pada Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan sosial.</li> </ol>



2	Suci Ayuningtyas <i>/Peran United Nations Woman dalam melindungi hak-hak kaum perempuan Somalia dan pengaruhnya terhadap kesetaraan gender</i>	Jenis penelitian deskriptif/ Konsep Organisasi Internasional	organisasi internasional mengambil peran melalui UN Women dengan kondisi negara Somalia yang tidak stabil antara pemerintah dan masyarakat meliputi kelompok militant maupun warga sipil yang menyebabkan tidak adanya perlindungan bagi korban luka-luka hingga meninggal dunia. Serta dengan adanya dengan badan ini yang bergerak dalam memberdayakan perempuan diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan serta menyembuhkan luka perempuan di Somalia yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan, perlakuan tak adil yang diakibatkan oleh konflik di Somalia
3	Nurliana <i>/Peran United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (UN Women) Dalam Penanganan Diskriminasi Sosial-Budaya di India</i>	Jenis penelitian deskriptif/ Konsep Organisasi Internasional dan Konsep Diskriminasi	penghapusan diskriminasi yang diberlakukan tidak akan menjamin dalam melindungi perempuan dari tindakan-tindakan berbasis gender tanpa didukung implementasi dari semua pihak yang terkait. Adapun peran UN Women yang menangani masalah tersebut sebagai instrumen melalui perannya sebagai fasilitator serta mediator dimana peran ini memberikan dampak positif dengan ditambahnya program bantuan yang turut membantu dan meringankan beban kehidupan perempuan di India.

4	Lista Waladeri <i>/Peran UNICEF Dalam Mengatasi Permasalahan Milisi Anak di Republik Afrika Tengah</i>	Jenis penelitian deskriptif/ Konsep Organisasi Internasional dan Konsep tentara anak dan <i>Human Security</i>	<i>UNICEF</i> yang berperan aktif dalam menghentikan permasalahan perekrutan milisi anak oleh koalisi seleka juga harus menyelasiakn misi-misi kemanusiaan yang lain seperti pendidikan, kesehatan serta pemulihan mental anak-anak pasca konflik yang mengakibatkan anak-anak tersebut mengalami berbagai macam perlakuan keras dari lingkungan sekitar bahkan dari keluarga sekalipun
5	Trisnawati <i>/Peran UNIFEM (United Nations Development Fund For Women) dalam upaya melindungi hak-hak perempuan pada konflik sipil Darfur</i>	Jenis penelitian deskriptif/ Organisasi Internasional dan <i>Gender Based Violence</i> (GDV)	Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan pada konflik Darfur dijadikan sebagai senjata oleh pasukan Janjaweed dalam memerangi para pemberontak. Dalam upayanya melindungi perempuan Darfur, UNIFEM mengaplikasikan program yang fokus terhadap penanganan GDV.
6	Nurul Anisa <i>/Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan</i>	Jenis penelitian deskriptif/ Konsep Organisasi Internasional dan Konsep bantuan luar negeri	Peran yang dilakukan organisasi <i>United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF)</i> terhadap program PAUD-HI tersebut adalah denha advokasi dan capacity building. Sedangkan efektifitas kerjasama pemerintah dan <i>UNICEF</i> dalam menjalankan program tersebut adalah dengan mengintegrasikan pelayanan PAUD-HI yaitu pendidikan, kesehatan dan bina keluarga balita, menjadi satu tempat menjadi Holisitik dan Integratif

## 1.5 Teori / Konsep

### a. Pemberdayaan Perempuan

Isu tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan selama ini telah menjadi isu yang sangat populer. Aksi-aksi protes dan pembelaan hak-hak kaum perempuan juga banyak didapati di berbagai belahan dunia. Namun sejatinya, salah satu hal yang paling penting guna meniadakan tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan adalah memberdayakan mereka. Lantas muncullah sebuah konsep yang kemudian disebut pemberdayaan perempuan. Konsep ini yang nantinya akan penulis gunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini.

Menurut Chandra, kata pemberdayaan perempuan merupakan sebuah upaya guna membangkitkan eksistensi power tau kekuatan perempuan yang selama ini dinafikan dan tereduksi karena adanya budaya patriarki. Pemberdayaan ini kemudian diimplementasikan dengan cara meningkatkan tingkat intelektualitas dan keterampilan perempuan-perempuan agar mereka juga dapat mendistribusikan power mereka.<sup>20</sup>

Sejalan dengan Chandra, Lorrain Guitierrez berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan merupakan upaya guna membangkitkan power perempuan yang sebelumnya dianggap *powerless* menjadi *empowered*. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya pendidikan yang layak, pembentukan komunitas untuk memperkuat integrasi perempuan dan upaya pelatihan-pelatihan penunjang

---

<sup>20</sup> Chandra, dalam: Sushama Sahay, *Women and Empowerment: Approaches and Strategi*, New Delhi: Discovering Publishing House, 1998, h. 18

*hard skill*. Upaya sosialisasi terhadap masyarakat guna meningkatkan level pemahaman atas eksistensi power perempuan juga sangat dibutuhkan guna membuat perempuan-perempuan yang sudah diberdayakan menjadi berkesinambungan dan tidak terjebak kembali dalam akar budaya yang membelenggu mereka.<sup>21</sup>

Secara konseptual konsep pemberdayaan perempuan hanya merupakan turunan dari konsep pemberdayaan (*empowerment*) yang berasal dari kata power yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana seseorang, rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi yang meliputi keyakinan, nilai dan pemikiran.<sup>22</sup>

Pemberdayaan perempuan di Malawi cenderung tertuju pada pemberdayaan yang bersifat struktural. Artinya pemberdayaan ini harus menargetkan pada pemberdayaan dalam sektor ekonomi, politik dan sosial.<sup>23</sup> Hal tersebut dikarenakan kondisi sosial ekonomi di Malawi masih terpuruk dan menjadi

---

<sup>21</sup> Lorrain Guitierrez, dalam Sushama Sahay, *Ibid.*, h. 17

<sup>22</sup> Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Mizan, 2003, h.35

<sup>23</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah BAPPENAS no. 20 Juni-Juli, 2000, h. 2

salah satu faktor yang pada akhirnya berakibat pada kekerasan gender dan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Jadi pemberdayaan perempuan dapat disimpulkan sebagai pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Hal ini juga akan secara otomatis mereduksi tindakan diskriminatif dan paham-paham yang selama ini melihat kaum perempuan hanya sebagai objek seksualitas belaka yang *powerless*.

Operasionalisasi konsep pemberdayaan perempuan dalam kasus yang penulis angkat, dapat dilihat dari eksistensi UN Women dalam memberdayakan dan menginisiasi program-program perlindungan hak-hak kaum perempuan di Malawi dan memfasilitasi mereka dalam setiap implementasi program-program pemberdayaan guna meningkatkan skill mereka dan membangkitkan *power* mereka agar dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial tanpa dibeda-bedakan dengan gender lainnya.

Pemberdayaan ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Malawi atas praktek kebudayaan-kebudayaan yang selama ini bersifat mendiskreditkan perempuan. Praktek-praktek kebudayaan tersebut adalah pernikahan dini, *sexual cleansing* dan *woman trafficking* yang selama ini dianggap sebagai praktek legal di Malawi. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan dan kualitas pendidikan serta produktifitas penduduk Malawi, sehingga perempuan pada akhirnya yang menjadi korbannya.

## **b. Kekerasan Terhadap Perempuan**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis juga menambahkan satu konsep tambahan sebagai alat analisa yaitu konsep kekerasan terhadap perempuan. Konsep ini penulis tambahkan guna sebagai alat analisa yang mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan kekerasan terhadap perempuan. Menurut definisi UN Women, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai berikut:

*“All acts involved the recruitment and/or transportation of women (or girls) within and across national borders for work or service by men's violence abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.”<sup>24</sup>*

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan yang melibatkan perekrutan atau penyaluran perempuan atau gadis atau perempuan di bawah umur, di dalam negeri maupun luar negeri untuk bekerja memberikan layanan yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan, penipuan, atau lewat bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya.

Dari definisi kekerasan terhadap perempuan tersebut, Zaitunah Subhan kemudian menjelaskan secara lebih terperinci mengenai tindakan kekerasan ini. Menurutnya kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi dua. Pertama adalah kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial lainnya. Kategori yang kedua

---

<sup>24</sup> UN Women, dalam: Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2001, h. 8

adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan psikologis yang dilakukan secara ilegal maupun dibenarkan oleh budaya setempat atau dibenarkan oleh negara.<sup>25</sup>

Jika dilihat dari definisi konsep kekerasan terhadap perempuan di atas, dapat dilihat bahwa praktek pernikahan dini, *sexual cleansing* dan *women trafficking* di Malawi merupakan praktek kekerasan perempuan yang sebenarnya. Praktek-praktek tersebut merupakan kategori kedua dalam kekerasan terhadap perempuan dimana perempuan menjadi korban kekerasan secara seksual dan psikologis ketika mereka dipaksa melakukan pernikahan dini ataupun ritual *sexual cleansing* yang dianggap legal oleh kebudayaan setempat. Praktek *women trafficking* juga merupakan salah satu praktek yang dianggap legal di Malawi. Keluarga yang umumnya hidup dalam taraf ekonomi menengah ke bawah tidak segan-segan untuk menitipkan anak perempuan mereka pada beberapa agen yang menyediakan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh perempuan di bawah umur, seperti bekerja di tempat hiburan malam dan menjadi pekerja seks komersial.

### **c. Organisasi Internasional**

Dalam merampungkan penelitian ini, penulis juga menggunakan alat analisa peran organisasi internasional. Sebelum penulis mendefinisikan peran organisasi internasional, penulis akan terlebih dahulu mendefinisikan pengertian Organisasi internasional. Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

*International Organization can be defined as a formal continuous structure established by agreement between members*

---

<sup>25</sup> Zaitunah Subhan, *Ibid.*, h. 8-9

*(governmental or non-governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership.*<sup>26</sup>

Archer mengatakan bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdeulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama. Sementara itu Michael Hess mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian. Definisi yang pertama menyatakan bahwa organisasi Internasional adalah suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Definisi yang kedua menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.<sup>27</sup>

Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing dapat tercapai dalam konteks internasional. Dengan demikian, organisasi internasional kemudian dapat berfungsi

---

<sup>26</sup> Clive Archer, *International Organization*, London: George Allen and Unwin Publisher, 1983, h. 35

<sup>27</sup> James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press, 1969, h. 131.



sebagai organisasi yang dapat membawa sebuah negara mencapai tujuan jangka panjangnya masing-masing.

Berdasarkan fungsinya, Organisasi Internasional dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu organisasi Intergovernmental atau IGO dan organisasi Non governmental atau INGO.<sup>28</sup> Kedua jenis organisasi internasional ini pada dasarnya mempunyai peran yang sama, yaitu mencapai tujuan inti masing-masing organisasi yang sesuai dengan visi mereka masing-masing. Peran spesifik organisasi internasional kemudian dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator.<sup>29</sup>

Operasionalisasi konsep peran organisasi internasional dalam kasus yang penulis angkat, dapat dilihat dari eksistensi UN Women yang telah menjadi inisiaor dalam menginisiasi program pemberdayaan perempuan dan mengakhiri tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal fasilitator UN Women juga telah memfasilitasi program-program pemberdayaan perempuan agar dapat menghasilkan produktifitas yang nyata bagi kaum perempuan. Dalam hal mediator, UN Women telah berhasil menjadi mediator yang menyuarakan anti kekerasan terhadap perempuan dan membantu mengakhiri pernikahan dini.

---

<sup>28</sup> Le Roy A. Bennet, *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc. 1997, h. 2-4.

<sup>29</sup> Andre Pareira, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung: Citra Aditia Bakti Press, 1993, h. 135

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting digunakan saat untuk melakukan suatu penelitian. Hal ini disebabkan karena metode penelitian dapat mempermudah peneliti untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dalam melakukan penelitian. Sehingga dapat menghasilkan penelitian yang benar dan akurat serta tidak diragukan lagi dalam menentukan kesimpulan. Selain itu, metode penelitian juga dapat membuat penulisan penelitian lebih sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi dengan cara membandingkan dan memilih data informasi yang tepat guna dijadikan sumber data kajian yang tepat.

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dimana proses penelitian berusaha untuk mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang terkait mengenai peran UN Women dalam memberdayakan perempuan dan meminimalisir tindakan pelanggaran hak bagi kaum perempuan. Penelitian model ini merupakan penelitian yang nantinya akan mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan “bagaimana”. Artinya penelitian model ini, sangat cocok diterapkan untuk mendeskripsikan mekanisme isu mendetail terkait fenomena-fenomena yang telah terjadi maupun sedang terjadi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 19-20

### 1.6.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang nantinya akan menggunakan data pustaka sebagai data sekunder. Data-data ini yang kemudian akan penulis gunakan sebagai pendukung dalam pembuktian teori terkait isu yang telah terjadi yang dibahas dalam penelitian ini. Metode kualitatif umumnya tidak membutuhkan pengolahan data secara statistik, melainkan hanya menjelaskan data-data yang ada secara sistemis.

Teknik analisis data kualitatif umumnya akan dimulai dengan menentukan proses pencarian, pemilihan, dan pengolahan data yang digunakan dalam riset. Teknik analisa data ditekankan pada dua jenis teknik yang berhubungan dengan pilihan jenis/tipe/metode penelitian yaitu deduksi dan induksi. Peneliti memakai teknik analisa data induksi yaitu data mengenai fenomena yang diteliti dikumpulkan, dipilah, dikelompokkan, dianalisis secara lengkap dan kronologis yang kemudian mempengaruhi proses pembentukan generalisasi sebagai hasil penelitian.<sup>31</sup>

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, yaitu mencari data mengenai penelitian ini melalui berbagai media yani buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, catatan, *website* , dan lain sebagainya, yang telah diolah oleh orang lain atau lembaga yang berupa data sekunder.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ruli Inayah Ramadhoan Sistematika Penulisan Research Design, diakses dalam <http://hi.umm.ac.id/files/file/SISTEMATIKA%20PENULISAN%20RESEARCH%20DESIGN.pptx> (15/03/2017, 21.14 WIB)

<sup>32</sup> Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2005, h. 61

#### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **a. Batasan Tahun**

Batasan tahun penelitian ini dimulai sejak 2012 hingga 2016, karena pada rentang waktu tersebut merupakan awal terbentuknya UN Women di Malawi serta merupakan rentang waktu implementasi program-program pemberdayaan perempuan dan upaya-upaya dalam mereduksi pelanggaran hak-hak terhadap kaum perempuan yang telah membudaya di Malawi.

##### **b. Batasan Materi**

Batasan materi dalam penelitian ini dimulai hanya terfokus pada pembahasan mengenai jenis-jenis kekerasan seksual di Malawi, tujuan UN Women dalam menjalankan misinya di Malawi dan program-program dan strategi UN Women dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan di Malawi. Selin itu, penelitian ini juga akan membahas seputar pengaruh eksistensi UN Women dalam mengimplementasikan program-program yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan di Malawi.

#### **1.7 Argumentasi Dasar**

Dalam sebuah penelitian, argumentasi dasar dibutuhkan guna memperkuat kelayakan sebuah penelitian sebelum dirampungkan, selain itu argumentasi dasar juga dibutuhkan guna sebagai asumsi awal dari isi sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis bahas di atas, dapat dilihat bahwa program-program UN Women yang diimplementasikan di Malawi mencakup pada program-

program pemberdayaan dalam menangani isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut. Program program tersebut adalah pemberdayaan secara perempuan dalam bidang unggul di Malawi yaitu bidang agrikultur. Program lainnya adalah program pengentasan kekerasan seksual dalam hal pernikahan dini dan mengedukasi para korbannya agar dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang semestinya. Salah satu hasil dari upaya UN Women adalah tereduksinya angka pernikahan dini dan amandemen standarisasi usia pernikahan di Malawi.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan guna membuat sebuah penelitian semakin mudah dipahami dan berjalan sesuai alur yang telah ditentukan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis buat dalam bentuk tabel guna membuat rincian sub bab penulis semakin jelas. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori/ Konsep 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Teknik Analisa Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Sistematika Penulisan
<b>BAB II: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI</b>	2.1 Sejarah Perkembangan UN Women

<p><b>MALAWI DAN GAMBARAN UMUM UN WOMEN</b></p>	<p>2.2 Kondisi Perempuan Di Malawi</p> <p>2.2.1 Akar kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>2.2.1.1 Budaya Patriarki</p> <p>2.2.1.2 Budaya Politik</p> <p>2.2.1.3 Kemiskinan</p> <p>2.2.1.4 Legal Status Perempuan di Malawi</p> <p>2.2.2 Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>2.2.2.1 Pernikahan Dini</p> <p>2.2.2.2 <i>Women Trafficking</i></p> <p>2.2.2.3 <i>Sexual Clensing</i></p> <p>2.3 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan</p>
<p><b>BAB III: PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UN WOMEN DI MALAWI</b></p>	<p>3.1 Program peningkatan Produktivitas Perempuan Malawi.</p> <p>3.1.1 <i>Supporting Reforms For Women Farmers' Greater Access To And Control Over Land.</i></p> <p>3.1.2 <i>Implement Initiatives That Promote Women's Access To Financing.</i></p> <p>3.1.3 <i>Improved Women Farmers' Productivity And Resilience To Climate Change.</i></p> <p>3.1.4 <i>Supporting Women Farmers To Move Up The Agricultural Value Chain</i></p> <p>3.2 Program pengentasan <i>woman Trafficking</i> dan pernikahan dini.</p> <p>3.3 Program Pengentasan Budaya <i>Sexual Clensing</i>.</p>

<b>BAB IV: PENUTUP</b>	4.1 Kesimpulan. 4.2 Saran
------------------------	------------------------------

